BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil dan pembahasan yang dilakukan di lokasi studi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan dengan faktor mikro dan makro alih fungsi lahan dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

4.1. Posisi Ketahanan Pangan (Padi) Terhadap Jenis Pangan Lainnya

Kabupaten Cianjur merupakan lumbung pangan bagi Provinsi Jawa Barat terutama pangan jenis padi. Tabel IV-1 menunjukkan perbandingan produksi beras di Kabupaten Cianjur dengan jenis tanaman pangan strategis jagung dan kedele.

Tabel IV-1
Produksi Komoditi Beras dan Tanaman Pangan Lainnya (Ton)

Tahun	Produksi Beras	Produksi Jagung	Produksi Kedele
2005	686.619	30.728	4.031
2006	698.005	25.504	4.431
2007	659.499	28.757	1.228
2008	715.060	26.226	8.932
2009	766.039	34.260	12.105
2010	862.228	35.621	9.424
2011	790.824	28.733	10.330
2012	868.538	42.491	6.984
2013	882.662	34.454	2.312
2014	830.545	35.168	20.356
2015	851.649	28.483	9.905
Rata-Rata	782,87	31,85	8,18

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017 (diolah)

Jika dilihat pada tabel IV-1 produksi padi lebih tinggi dibanding dengan jenis pangan lainnya seperti jagung dan kedele. Produksi yang lebih tinggi ini selain karena makanan pokok adalah beras juga karena Cianjur sebagai lumbung pangan bagi provinsi. Dari tabel dapat dilihat bahawa produksi padi di Kabupaten Cianjur sejak tahun 2005 hingga 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata produksi sebesar 782,87 ton.

Tabel IV-2
Konsumsi Pangan Kabupaten Cianjur 2005-2015 (Ton/Tahun)

Tahun	Beras	Jagung	Kedelei
2005	205.984	4.596	109
2006	203.770	5.539	110
2007	193.462	6.691	222
2008	206.608	5.072	115
2009	199.890	3.995	113
2010	195.751	3.395	113
2011	197.768	2.650	115
2012	194.630	3.373	116
2013	190.295	2.901	115
2014	189.178	2.680	0
2015	190.482	2.690	0
Rata-Rata	197.074	3.962	102

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel IV-2 dapat dilihat bahwa konsumsi beras di Kabupaten Cianjur sangat tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya yaitu jagung dan kedele. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 konsumsi beras di Kabupaten Cinajur terus menurun namun pada tahun 2015 konsumsi kembali meningkat. Rata-rata konsumi beras di Kabupaten Cianjur tahun 2005-2015 adalah 197 ton. Hasil konsumsi pangan ini diperoleh dengan mengalikan jumlah konsumsi pangan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur.

Tabel IV-3
Perbandingan Jumlah Produksi Beras dengan Konsumi Beras di Kabupaten Cianjur (Ton)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Surplus	Surplus (Dinas Pertanian Kab. Cianjur)
2005	686.619	205.984	480.635	-
2006	698.005	203.770	494.235	174.652
2007	659.499	193.462	466.037	162.949
2008	715.060	206.608	508.452	190.058
2009	766.039	199.890	566.149	222.355
2010	862.228	195.751	666.477	290.261
2011	790.824	197.768	593.056	246.735
2012	868.538	194.630	673.908	247.683

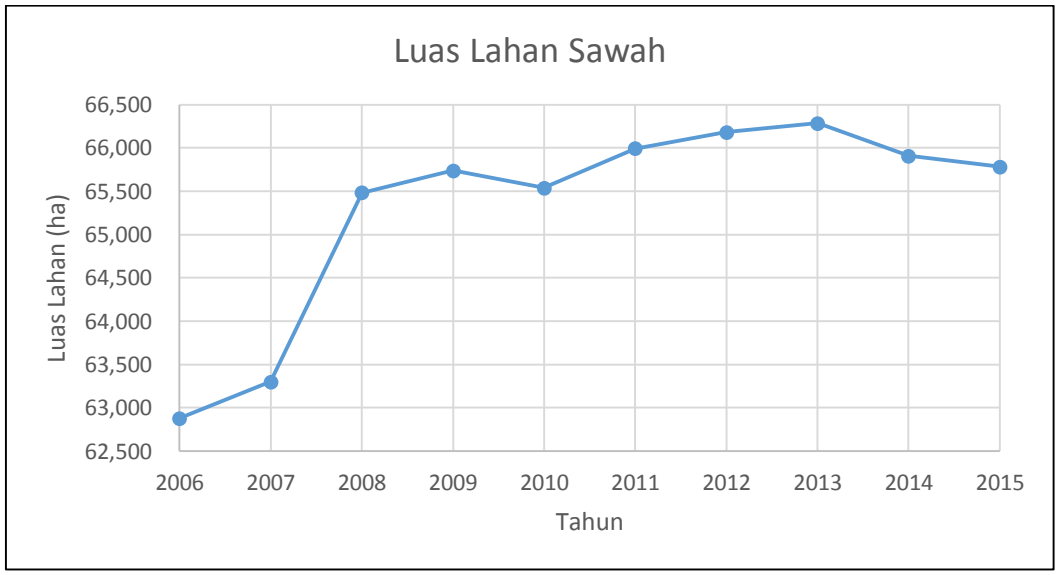
2013	882.662	190.295	692.367	304.833
2014	830.545	189.178	641.367	302.036
2015	851.649	190.482	661.167	241.233
Rata-Rata	782,87	197.074	527.299	238.280

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel IV-3 dapat dilihat bahwa produksi beras Cianjur melebihi konsumsi masyarakat dengan rata-rata surplus beras sebesar 527.299 ton pertahun. Hasil surplus beras didapat dengan melihat selisih antara produksi dan konsumsi beras.

4.2. Pola dan Laju Alih Fungsi Lahan Kabupaten Cianjur Serta Faktor Yang Mempengaruhinya

Alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur hampir sering terjadi. Perubahan lahan tersebut umumnya menjadi kawasan permukiman, industri, maupun perdagangan dan jasa. Perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada gambar 4.1.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Cianjur, 2017

Gambar 4.1 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2015

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Cianjur relatif meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2013, namun pada tahun 2014 hingga 2015 realtif menurun. Penurunan luas lahan sawah dari tahun 2013 ke tahun 2014 ini cukup signifikan karena adanya pembukaan lahan untuk industri dan permukiman. Pada tahun 2013 luas lahan sawah di Kabupaten Cianjur sebesar 66.283

hektar turun menjadi 65.909 hektar pada tahun 2014 dan kembali mengalami penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 65.782 hektar. Pada sepuluh tahun terakhir secara umum terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 691 hektar atau 76.78 hektar per tahun. Laju penyusutan luas lahan sawah selanjutnya bisa dilihat pada tabel IV-4.

Tabel IV-4
Luas dan Laju Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2015

Tahun	Luas Sawah (Ha)	Percetakan Sawah Baru (Ha)	Luas Sawah Terkonversi (Ha)	Laju Alih Fungsi Sawah (%)
2006	62.879	-	-	-
2007	63.299	420	0	0.66
2008	65.483	2.184	0	3.34
2009	65.736	253	0	0.38
2010	65.540	0	190	-0.30
2011	65.993	453	0	0.69
2012	66.180	187	0	0.28
2013	66.283	103	0	0.16
2014	65.909	0	374	-0.57
2015	65.782	0	127	-0.19
Total		3.600	691	4.45
Rata-Rata		400	76.78	0.44

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur 2017 (diolah)

Pada tabel IV-4 nilai laju alih fungsi sawah yang bertanda negatif menunjukkan bahwa terjadi penyusutan lahan sawah menjadi fungsi lain. Nilai positif menjelaskan adanya lahan yang digunakan sebagai lahan sawah baru pada tahun tersebut. Laju penyusutan lahan sawah di Kabupaten Cianjur yaitu dengan total sekitar 4,45 persen atau sekitar 691 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan lahan sawah di Kabupaten Cianjur sebesar 4,45 persen atau 691 hektar per tahun. Penyusutan lahan sawah ini terjadi pada tahun 2010, 2013 hingga 2015.

Hasil penyusutan lahan tersebut didapat dengan menggunakan analisis laju penyusutan lahan dengan menghitung selisih penyusutan lahan tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Hasil dari selisih tersebut lalu dibagi dengan luas lahan saat ini dikali 100%, maka akan didapat hasil laju penyusutan lahan setiap tahunnya.

4.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Luas Lahan Sawah Kabupaten Cianjur

4.2.1.1. Faktor Makro

Alih fungsi lahan pertanian dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian terbagi menjadi dua yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro merupakan faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan ditingkat wilayah, dalam penelitian ini Kabupaten Cianjur. Sedangkan faktor mikro merupakan faktor alih fungsi lahan pertanian yang dipengaruhi berdasarkan keputusan petani. Dalam penelitian ini faktor makro yang diasumsikan mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian adalah PDRB, laju pertumbuhan penduduk dan jumlah industri. Hal ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Mustopa, Purbayu & Santosa (2012).

Analisis dalam menentukan faktor makro yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di tingkat wilayah menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data *time series* tahun 2006-2015. Dalam menganalisis data-data tersebut menggunakan software *Statistical Program Service Solution 24.0.*

Pada penelitian sebelumnya yang ada di Kabupaten Cianjur, faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah jumlah industri dan PDRB non pertanian. Jumlah industri berbanding lurus dengan peningkatan permintaan kebutuhan akan luas lahan. Adanya penambahan jumlah industri menyebabkan kebutuhan lahan meningkat. Harga sewa yang diberikan oleh sektor industri lebih besar dibandingkan harga sewa dari lahan sawah itu sendiri. Sementara itu PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mempercepat terjadinya perubahan struktur ekonomi ke arah sektor manufaktur, jasa, dan sektor non pertanian lainnya. Kebijakan pemerintah daerah yang akan diimplementasikan sangat dipengaruhi oleh PDRB. Pemerintah akan memprioritaskan sektor yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB sehingga terjadi proses

struktural ekonomi, sehingga hal ini menyebabkan adanya pengalihfungsian lahan dari pertanian ke non pertanian.

Berikut hasil persamaan regresi linear penelitian terdahulu yang dilakukan di Kabupaten Cianjur oleh Sulistyawati (2014) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan ditingkat wilayah.

$$\mathbf{LnY = 13{,}863 - 0{,}136LnX_1 + 0{,}022LnX_2 - 0{,}167LnX_3 + 0{,}074LnX_4}$$

Keterangan:

Y = Luas lahan sawah

X_1 = Jumlah industri

X_2 = Panjang aspal

X_3 = PDRB non pertanian

X_4 = Produktivitas padi sawah

Pada penelitian ini faktor-faktor makro yang digunakan adalah PDRB, jumlah penduduk dan jumlah industri. Analisis yang digunakan untuk mengetahu faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel IV-5
Hasil Korelasi Faktor-Faktor Makro Terhadap Luas Lahan Sawah

Correlations

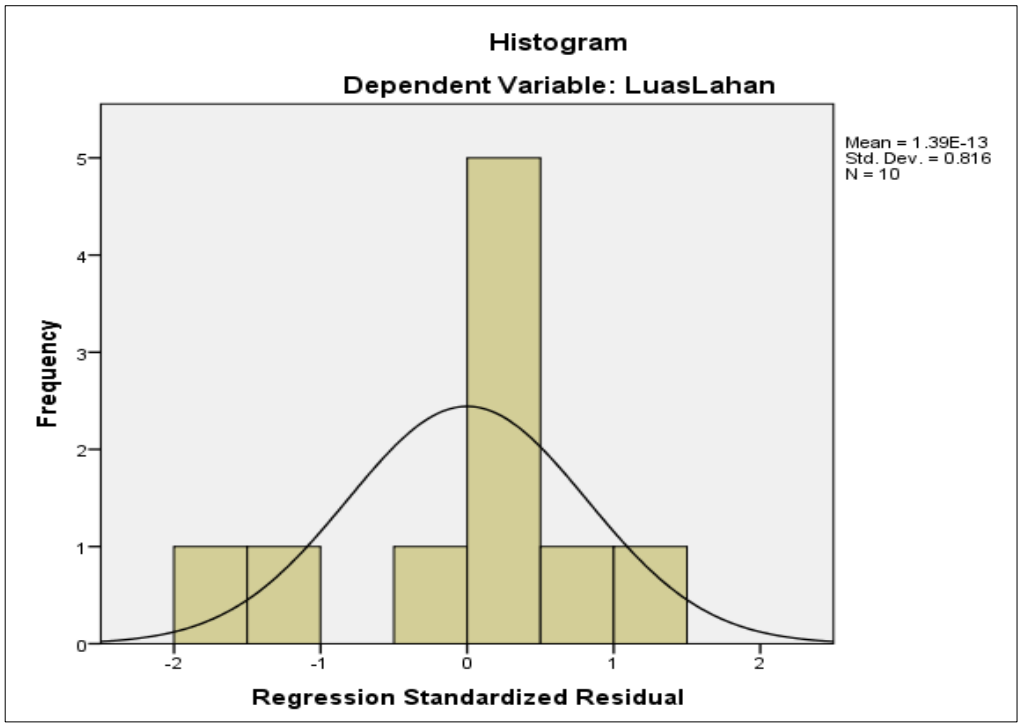
		LuasLahan	PDRB	JumlahPenduduk	Industri
Pearson Correlation	LuasLahan	1.000	.766	.896	-.552
	PDRB	.766	1.000	.875	-.312
	JumlahPenduduk	.896	.875	1.000	-.342
	Industri	-.552	-.312	-.342	1.000
Sig. (1-tailed)	LuasLahan	.	.005	.000	.049
	PDRB	.005	.	.000	.190
	JumlahPenduduk	.000	.000	.	.166
	Industri	.049	.190	.166	.
N	LuasLahan	10	10	10	10
	PDRB	10	10	10	10
	JumlahPenduduk	10	10	10	10
	Industri	10	10	10	10

Berdasarkan tabel IV-5 dapat dilihat bahwa PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh dengan adanya alih fungsi lahan. Hal ini dapat dilihat dari nilai variabel bebas PDRB sebesar 0,005 dan variabel bebas jumlah penduduk sebesar 0,000 yang berarti kedua variabel ini mempengaruhi variabel terikatnya yaitu luas lahan sawah. Pada penelitian ini digunakan alpha 0,005yang mana jika nilai korelasi besar dari alpha 0,005 maka tidak ada pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Sebaliknya jika nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,005 maka terdapat pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,874 yang mana hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen mencapai 87,4 persen dan sisanya 12,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Selain itu nilai *adjusted R-square* yang diperoleh sebesar 81,1 persen. (Lampiran 3)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama maka dilakukan uji koefisien regresi menyeluruh (F). Berdasarkan hasil uji tersebut maka nilai signifikansinya adalah 0,004 yang berarti H_0 ditolak dan variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Nilai F hitung dalam uji ini bernilai 13,844 lebih besar dari f tabel. (Lampiran 3)

Selain itu dilakukan pula uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain secara tetap. Beradasarkan hasil uji variansi residual yang dihasilkan telah memenuhi uji heteroskedastisitas yang mana variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak sama. (Lampiran 3)

Untuk membuktikan asumsi normalitas maka digunakan nilai probabilitas pada *histogram of normality test*. Hasil dari uji normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 ***Histogram of Normality Test***

Berdasarkan gambar histogram 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini residual menyebar secara normal atau tidak terjadi permasalahan normalitas. Dalam model ini dapat dilihat nilai probabilitasnya adalah 0,816 atau 81,6 persen.

Uji terakhir yang dilakukan adalah uji autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan diantara galat dalam persamaan regresi yang diperoleh. Untuk mengetahui hasil uji ini maka dapat melihat pada nilai *Durbin Watson Test.* Berdasarkan hasil uji maka dapat diketahui nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah 1,531. Hal ini berarti terdapat hubungan diantara galat dalam persamaan regresi yang diperoleh karena hasilnya mendekati 2. Sebaliknya jika hasilnya mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi.

Tabel IV-6
Hasil Uji Faktor-Faktor Makro Yang Mempengaruhi Perubahan Luas Lahan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-.898	4.061		-.221	.832			
	PDRB	-.005	.016	-.095	-.316	.763	.766	-.128	-.046
	JumlahPenduduk	.850	.291	.884	2.916	.027	.896	.766	.423
	Industri	-.074	.041	-.279	-1.807	.121	-.552	-.594	-.262

a. Dependent Variable: LuasLahan

Berdasarkan hasil uji tabel IV-6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,898

2. Sementara itu koefisien PDRB -0,005 yang mana jika dilihat dari nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5 dan $t_{hit} < t_{tab}$ yaitu 1,83 (Lampiran 3) sehingga PDRB tidak berpengaruh terhadap luas lahan sawah; koefisien jumlah penduduk 0,850 yang mana jika dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 dan nilai $t_{hit} > t_{tab}$. Hal ini berarti jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap perubahan luas lahan. Koefisien industri sebesar -0,074 dengan nilai signifikansi sebesar 0,121 dan nilai $t_{hit} < {}_{ttab}$ yaitu 1,83 yang berarti variabel industri tidak berpengaruh secara langsung terhadap luas lahan sawah.

3. Nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan alpha 5% dan df 0,95 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,83. Dengan aturan keputusan menerima H_0 jika t hitung < t tabel dan nilai Sig lebih besar dari alpha (0,005) dan menolak H_0 jika $t_{hit} > t_{tab}$ dan nilai Sig lebih kecil daripada alpha (0,005).

Berikut adalah hasil persamaan regresi faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan sawah ditingkat wilayah:

$$\mathbf{LnY = -0{,}898 - 0{,}005LnX_1 + 0{,}850LnX_2 - 0{,}074LnX_3}$$

Keterangan:

Y = Luas lahan sawah

X_1 = PDRB

X_2 = Jumlah penduduk

X_3 = Jumlah industri

Dari persamaan linear diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari variabel bebas maka akan mempengaruhi variabel terikat. Persamaan regresi menggunakan logaritma natural ini bertujuan untuk menyelesaikan persamaan yang tidak linear menjadi non linear.

Berdasarkan hasil korelasi dari model regresi dapat dilihat bahwa koefisien PDRB berpengaruh negatif (-) terhadap perubahan luas sawah. Hal ini berarti PDRB tidak berpengaruh secara nyata terhadap perubahan luas lahan sawah. Sementara itu koefisien jumlah penduduk berpengaruh positif (+) terhadap perubahan luas sawah dimana setiap kenaikan satu satuan dari variabel penduduk maka akan berdampak pada perubahan luas lahan sawah. Jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya akan mempengaruhi peruntukan lahan. Penduduk membutuhkan permukiman sebagai salah satu kebutuhan primernya. Seringkali kebutuhan akan lahan pertanian untuk mencukupi pangan penduduk mengalami benturan dengan kebutuhan penduduk akan permukiman sehingga terjadi *land competition.* Variabel jumlah industri berpengaruh negatif (-) terhadap perubahan luas lahan sawah. Hal ini berarti jumlah industri tidak berpengaruh secara nyata terhadap perubahan luas lahan sawah dan diinterpretasikan bahwa jumlah industri di Kabupaten Cianjur belum tentu membutuhkan lahan yang luas sampai harus mengalihfungsikan lahan sawah atau setiap perubahan lahan sawah dikenakan disinsentif dengan mencetak lahan sawah baru di daerah lain yang masih berada dalam satu kabupaten.

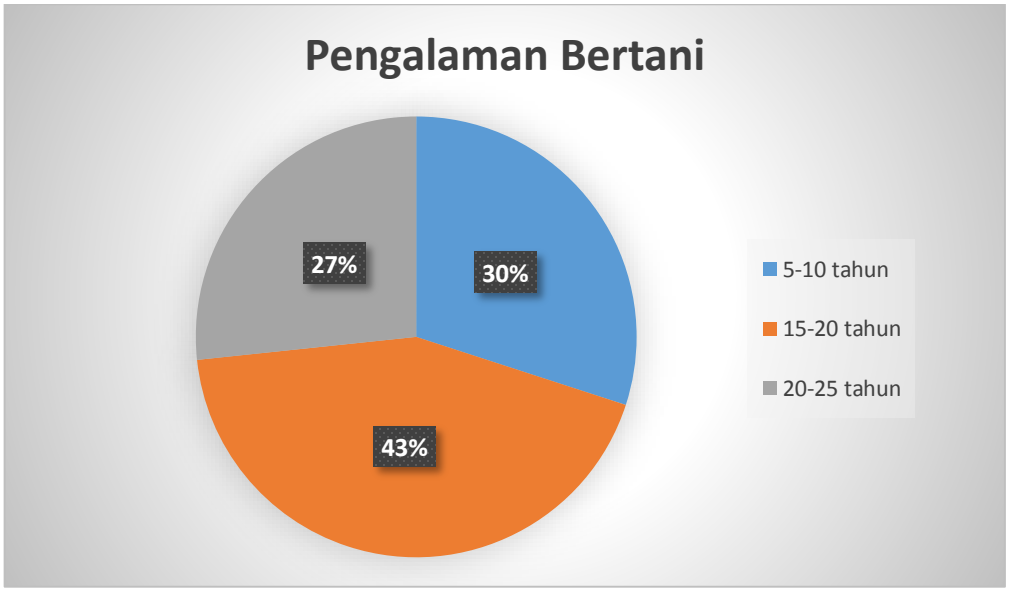
4.2.1.2. Faktor Mikro

Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makro saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor mikro. Faktor mikro dalam penelitian ini merupakan gambaran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan petani. Faktor mikro yang dilihat dari penelitian ini adalah pengalaman bertani, jumlah tanggungan, luas

lahan, biaya produksi dan pendapatan dari usaha tani, serta bagaimana persepsi petani terhadap alih fungsi lahan. Berikut penjelasan masing-masing faktor.

A. Pengalaman Bertani

Pengalaman bertani adalah periode atau lamanya seseorang telah melakukan kegiatan bertani semasa hidupnya. Semakin lama seseorang bertani maka keahlian untuk bertani akan semakin tinggi. Pengalaman bertani diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan petani memiliki keinginan untuk menjual lahannya.



Sumber: Data Primer, 2017

Gambar 4.3 Persentase Pengalaman Bertani

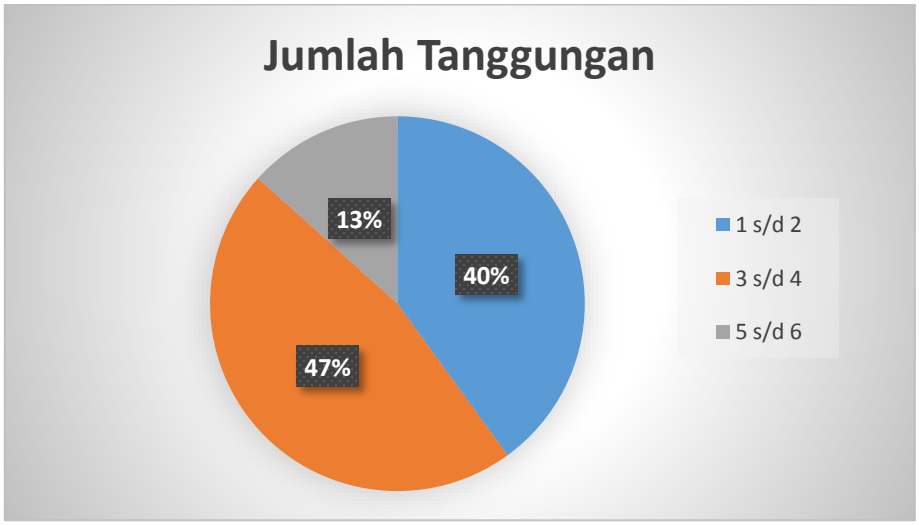
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa petani dengan pengalaman pada rentang 15 sampai 20 tahun paling banyak dengan persentase 43 persen atau sebanyak 13 orang. Sedangkan petani dengan pengalaman pada rentang 20 sampai 25 tahun merupakan jumlah yang paling sedikit yaitu dengan persentase 27 persen atau sebanyak 8 orang.

B. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan adalah jumlah orang yang kebuthan kehidupannya hidupmya masih ditanggung oleh petani. Jumlah tanggungan inidianggap

mempengaruhi keputusan petani untuk menjual lahannya atau mempunyai keinginan untuk menjual lahannya.

Berdasarkan hasil survey sebagian besar responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak tiga sampai empat orang yaitu sebesar 47 persen. Responden yang memiliki jumlah tanggungan. Responden yang memiliki jumlah tanggungan tiga sampai empat orang sebesar 40 persen dan responden yang memiliki jumlah tanggungan satu sampai dua orang memiliki persentase paling kecil yaitu sebesar 13 persen.

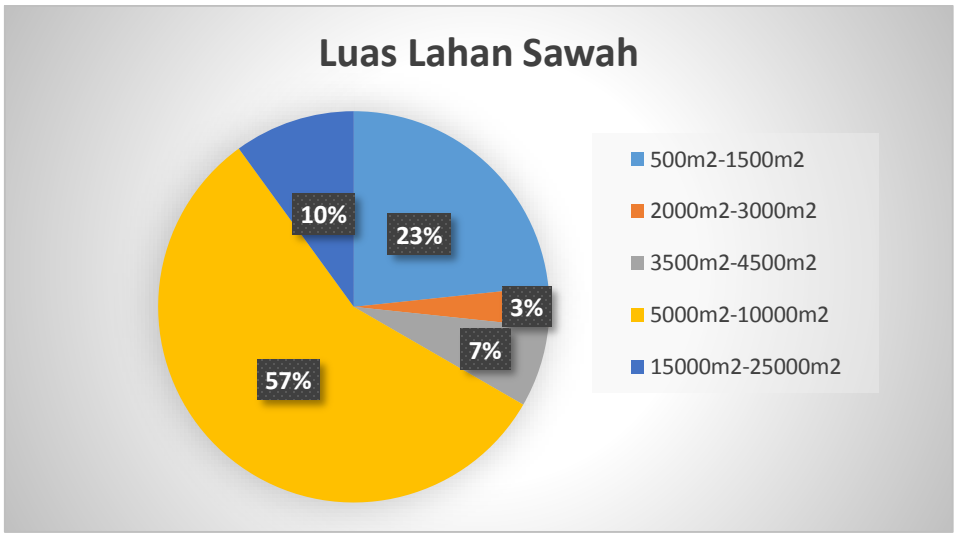


Sumber: Data primer, 2017

Gambar 4.4 Perbandingan Jumlah Tanggungan Responden

C. Luas Lahan

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi petani untuk menjual lahannya adalah luas lahan sawah yang dimiliki oleh petani tersebut. Luas lahan adalah besarnya area sawah atau pertanian yang dimiliki oleh petani. Luas lahan tentunya berpengaruh pada produsktivitas padi para petani. Semakin luas lahan sawah yang dimiliki petani maka nilai jualnya tentu akan semakin tinggi.



Sumber: Data primer, 2017

Gambar 4.5 Perbandingan Luas Lahan Responden

Berdasarkan diagram diatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase petani yang memiliki luas lahan terbanyak adalah seluas 5000m^2 sampai 10000m^2 atau 1 hektar dengan persentase 57 persen atau sebanyak 17 orang. Sedangkan petani dengan luas lahan terkecil yaitu seluas 2000m^2 sampai 3000m^2 dengan persentase 3 persen atau 1 orang.

D. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya pengeluaran petani untuk memproduksi padi hingga panen tiba, seperti bibit, pupuk, air, dan lain-lain. Variabel ini dapat mempengaruhi keputusan petani, karena jika biaya semakin tinggi maka petani akan merasa rugi dan cenderung menjual lahan pertaniannya.

Berdasarkan hasil survey maka biaya produksi paling tinggi terletak pada rentang harga Rp. 7.500.000 sampai dengan Rp. 8.500.000 dengan persentase sebanyak 37 persen. Sedangkan biaya produksi pertanian dengan biaya Rp.4.000.000 sampai Rp.5.500.000 merupakan biaya produksi pertanian paling kecil persentasenya yaitu sebanyak 3 persen.



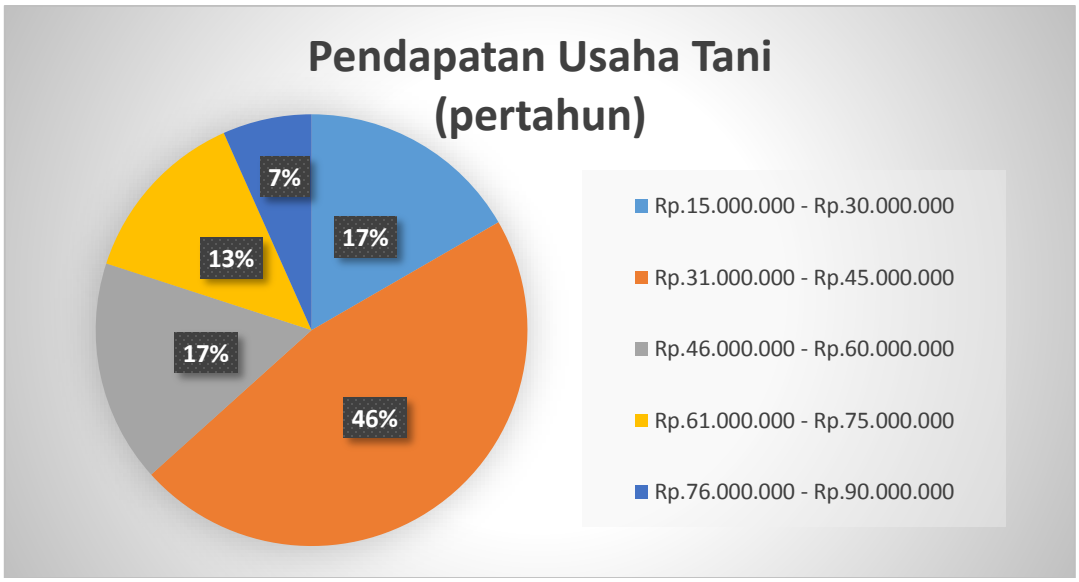
Sumber: Data primer, 2017

Gambar 4.6 Perbandingan Biaya Produksi Pertanian Responden

E. Pendapatan dari Usaha Tani

Pendapatan dari usaha tani adalah pendapatan dari hasil usaha tani dibandingkan dengan pendapatan total. Pendapatan total yaitu pendapatan dari hasil usaha tani ditambah dengan pendapatan sampingan. Jika proporsi pendapatan petani yang diperoleh dari hasil usaha tani rendah, ada kemungkinan petani tersebut akan menjual lahannya untuk jenis usaha yang lain.

Rata-rata responden mempunyai tingkat pendapatan berkisar antara 31-45 juta rupiah pertahun dengan persentasi 46 persen sebanyak 14 orang. Tingkat pendapatan terkecil (76-90 juta rupiah pertahun) berjumlah 2 orang atau sekitar 7 persen dari total responden. Beberapa petani berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha tani tidak memberikan keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan mahalnya kebutuhan untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas seperti bibit, pupuk, termasuk pengairan, transportasi dan harga sewa lahan bagi petani yang menyewa lahan sawah.



Sumber: Data primer, 2017

Gambar 4.7 Perbandingan Jumlah Pendapatan Responden

F. Persepsi Terhadap Alih Fungsi Lahan

Persepsi terhadap alih fungsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan petani terhadap adanya alih fungsi lahan yang ada, apakah para petani mempunyai keinginan untuk menjual lahan sawahnya atau tidak.

Berdasarkan hasil survey sebanyak 17 orang petani tidak mempunyai keinginan untuk menjual lahannya dan selebihnya sebanyak 3 orang mempunyai keinginan untuk menjual lahannya. Petani yang ingin menjual lahannya dikarenakan keuntungan yang didapat dari usaha tani tidak terlalu banyak. Selain itu biaya produksi yang dibutuhkan lebih tinggi membuat petani kesulitan untuk mencari modal sehingga harus melakukan peminjaman yang lebih untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

Tabel IV-7
Persepsi Terhadap Alih Fungsi Lahan

Keinginan Untuk Menjual Lahan	Ya	Tidak	Harga Lahan yang Ingin Dijual
	3	17	Rp.250.000/m^2-Rp.350.000/m^2
Pernah Ditawari Menjual Lahan	2	18	Rp. 2 milyar-Rp. 3 milyar

Sumber: Data Primer, 2017

4.3. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Produksi Padi Kabupaten Cianjur dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan

Alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah tentunya akan memberikan dampak langsung pada produksi padi dan juga nilai produksi padi di suatu wilayah. Penurun an luas lahan sawah yang menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas padi akan menyebabkan penurunan hasil produksi padi jika tidak diimbangi dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kembali produksi padi seperti inovasi teknologi, percetakan sawah baru yang dapat menggantikan produksi padi yang hilang, dan irigasi persawahan yang lebih baik. Adanya alih fungsi lahan ini berdampak pada produksi padi dan nilai produksi padi yang dipengaruhi oleh produktivitas padi sawah, luas lahan yang terkonversi, produksi padi yang hilang, dan nilai produksi padi yang hilang.

Pada penelitian ini diasumsikan luas sawah yang dialihfungsikan tidak ada yang gagal panen dalam satu tahun. Produktivitas sawah adalah hasil panen per hektar lahan sawah. Selain itu diasumsikan pula pola tanam yang diterapkan adalah dua kali dalam setahun untuk seluruh lahan sawah, dan jenis sawah diasumsikan sama termasuk jenis padi yang ditanam maupun jenis irigasi yang digunakan. Perhitungan mengenai produksi dan nilai produksi yang hilang dapat dilihat pada tabel IV-8.

Tabel IV-8
Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi dan Nilai Produksi Padi di Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2015

Tahun	Produktivitas Padi Sawah (ku/ha)	Luas Lahan Terkonversi (ha)	Produksi Padi yang Hilang (ton)	Nilai Produksi Padi yang Hilang (Rp)
2006	49	0	0	0
2007	50	0	0	0
2008	50	0	0	0
2009	53	190	10.070	44.308.000
Tahun	**Produktivitas Padi Sawah (ku/ha)**	**Luas Lahan Terkonversi (ha)**	**Produksi Padi yang Hilang (ton)**	**Nilai Produksi Padi yang Hilang (Rp)**
2010	53	0	0	0
2011	54	0	0	0
2012	57	0	0	0
2013	56	374	20.944	92.153.600

2014	58	127	7.366	32.410.400
2015	55	0	0	0
Total		691	38.380	168.872.000

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017 (diolah)

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dibuat dan hasil perhitungan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa total produksi padi yang hilang selama sepuluh tahun terakhir akibat alih fungsi lahan sebesar 41.859,76 ton. Nilai produksi padi diestimasi menggunakan harga gabah kering giling (GKG) dikalikan dengan jumlah produksi padi yang hilang. Jika rata-rata harga GKG Rp 4.400 per kg atau Rp. 4.400.000 per ton, maka kehilangan nilai produksi tersebut menjadi 38380 ton x Rp. 4.400.000 per ton = Rp. 168.872.000. Jadi nilai produksi padi yang hilang sebesar Rp. 168.872.000 atau sekitar 168 milyar rupiah.

Alih fungsi lahan pertanian tentunya akan memberikan dampak pada ketahanan pangan daerah di Kabupaten Cianjur jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pengendalian. Permasalahanan ketahanan pangan tidak hanya menurunkan produksi beras tetapi juga berdampak pada perkembangan penduduk, sosial, ekonomi dan juga politik. Penurunan luas lahan sawah yang berdampak pada menurunya produksi pangan tentunya berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya. Simulasi ini dilakukan dengan membandingkan jumlah beras yang diproduksi dan jumlah beras yang dibutuhkan oleh masyarakat ditahun mendatang.

Jumlah beras yang diproduksi diperoleh dari konversi gabah pada satu tahun yang sama. Jumlah gabah yang diproduksi dihitung dari luas lahan dikalikan produktivitas sawah. Luas sawah per tahunnya diasumsikan berubah dengan laju sebesar 0,44 persen dan produktivitas lahan naik. Nilai tersebut didapat dari rata-rata laju perubahan pada tahun 2006 sampai tahun 2015. Berikut tabel IV-9 menunjukkan produktivitas sawah yang meningkat berdasarkan hasil prediksi.

Tabel IV-9
Produktivitas Sawah di Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2034

Tahun	Produktivitas
2016	59.23
2017	60.16

2018	61.09
2019	62.02
2020	62.95
2021	63.88
2022	64.81
2023	65.74
2024	66.67
2025	67.6
2026	68.53
2027	69.46
2028	70.39
2029	71.23
2030	72.25
2031	73.18
2032	74.12
2033	75.05
2034	75.98

Sumber: Kementerian Pertanian, 2015

Jumlah gabah dikonversi dengan asumsi bahwa jumlah beras merupakan 62,74 persen dari jumlah gabah. Angka tersebut merupakan ketetapan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Angka tersebut merupakan hasil dari Survei Susut Panen dan Pasca Panen Gabah/Beras. Jumlah kebutuhan beras masyarakat didapat dari jumlah penduduk dikalikan jumlah konsumsi beras per kapita. Jumlah penduduk diasumsikan berubah pertahunnya dengan laju sebesar 0,54 persen dan konsumsi beras diasumsikan tetap yaitu 114 kg per jiwa. Berdasarkan asumsi tersebut maka perkiraan luas sawah dan dampak terhadap ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel IV-10.

Tabel IV-10
Perkiraan Perubahan Luas Lahan dan Dampak Terhadap
Ketahanan Pangan di Kabupaten Cianjur dengan Konsumsi Beras Perkapita Tetap

Tahun	Luas Lahan Sawah (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)	Selisih Beras (Ton)
2015	65.782	2.243.904	2.406.136	255.805	2.150.331
2016	66.075	2.256.054	2.455.393	257.190	2.198.203
2017	66.367	2.268.270	2.504.991	258.583	2.246.408
2018	66.660	2.280.551	2.554.931	259.983	2.294.948
2019	66.953	2.292.900	2.605.212	261.391	2.343.822
2020	67.245	2.305.315	2.655.835	262.806	2.393.029
2021	67.538	2.317.797	2.706.799	264.229	2.442.571
2022	67,830	2.330.347	2.758.105	265.660	2.492.446
2023	68,123	2.342.965	2.809.753	267.098	2.542.655
2024	68,416	2.355.651	2.861.741	268.544	2.593.197
2025	68,708	2.368.406	2.914.072	269.998	2.644.073
2026	69,001	2.381.230	2.966.743	271.460	2.695.283
2027	69,294	2.394.124	3.019.757	272.930	2.746.827
2028	69,586	2.407.087	3.073.111	274.408	2.798.703
2029	69,879	2.420.120	3.122.862	275.894	2.846.968
2030	70,171	2.433.224	3.180.845	277.388	2.903.458
2031	70,464	2.446.399	3.235.224	278.890	2.956.335
2032	70,757	2.459.645	3.290.389	280.400	3.009.989
2033	71,049	2.472.963	3.345.453	281.918	3.063.535
2034	71,342	2.486.354	3.400.858	283.444	3.117.414

Sumber: Badan Pusat Statistik,2016 (diolah)

**Catatan:

Asumsi yang digunakan:

- Konsumsi beras perkapita tetap: 114 kg/jiwa/tahun (Badan Pusat Statistik)
- Total perubahan luas lahan sawah: 0,44% selama 10 tahun
- Kandungan beras: 62,74% dari jumlah gabah (BPS dan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian)

Berdasarkan tabel IV-10 maka dapat disimpulkan bahwa selama 20 tahun yang akan datang (2016-2034) produksi beras di Kabupaten Cianjur melebihi dari kebutuhan beras penduduknya. Surplus beras ini dikarenakan luas lahan yang bertambah diikuti dengan produktivitas yang bertambah setiap tahunnya.

Dilihat dari segi nasional, kebutuhan beras masyarakat Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan beras di negara lain. Menurut United States Department of Agriculture (2013) Indonesia menempati urutan ketiga dalam penyediaan beras di dunia mengingat lebih dari 90% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya yakni mencapai 39,12 juta ton

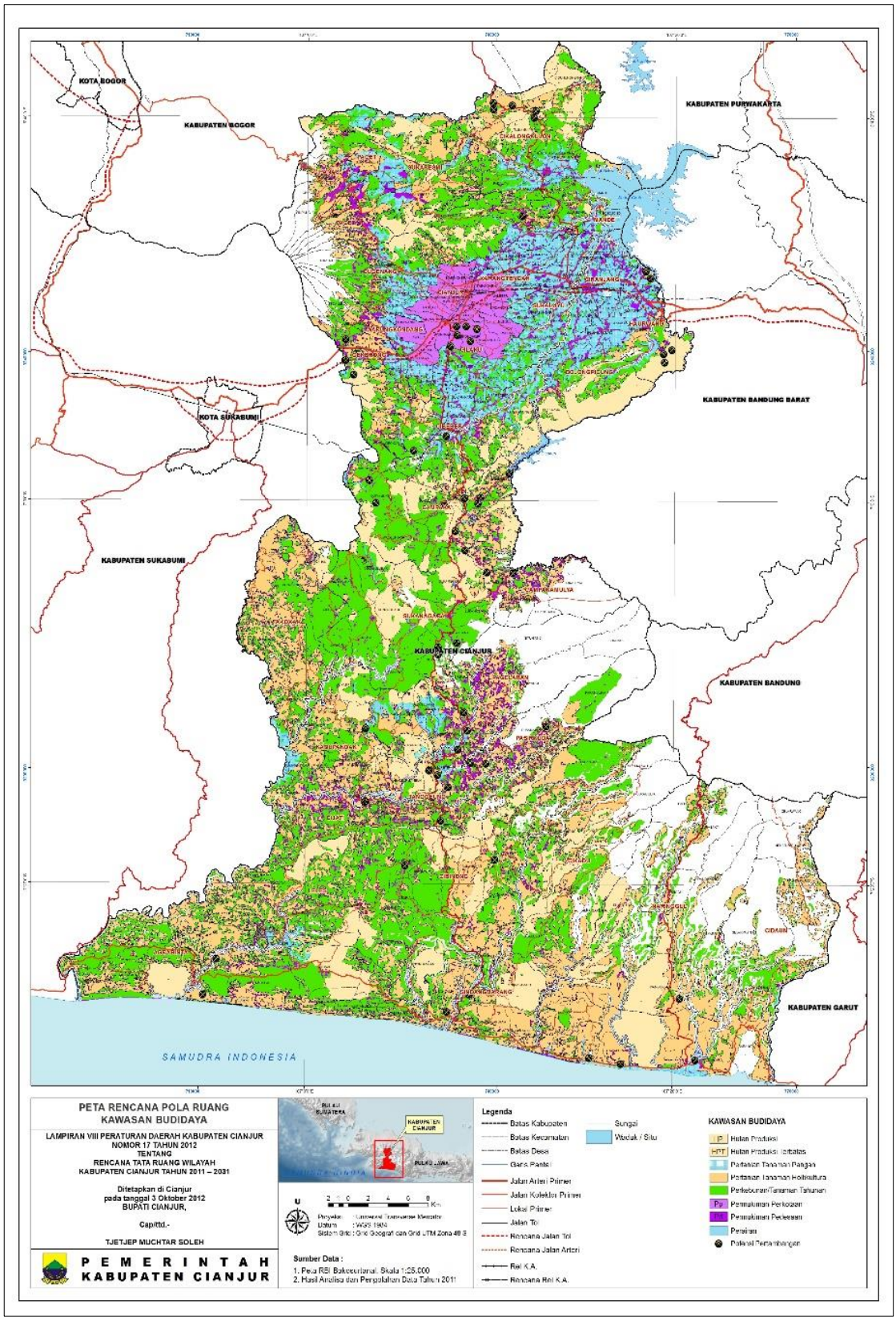
atau 8,60% dari total penyediaan beras dunia. Selain itu USDA juga memprediksi walaupun luasan tanam padi Indonesia akan bertambah dan konsumsi per kapita masyarakat akan beras cenderung menurun, impor akan tetap dilakukan untuk pengamanan stok beras dalam negeri

4.4. Evaluasi Kebijakan LP2B di Kabupaten Cianjur dan Ditingkat Petani

Berdasarkan RTRW Nasional Tahun 2008-2028 peruntukan kawasan di Jawa Barat terutama kawasan Bogor-Puncak-Cianjur adalah sebagai kawasan pertanian, pariwisata, perikanan dan industri. Sedangkan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan (WP) melalui WP Bodebekpunjur. Dalam RTRW disebutkan bahwa WP merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem nasional. Selain ditetapkan sebagai WP, Kabupaten Cianjur juga ditetapkan sebagai:

1. Kawasan pertanian pangan beririgasi teknis dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat
2. Diarahkan untuk pengembangan agribisnis dan pertanian

Sementara itu Bappeda Kabupaten Cianjur membuat RTRW Kabupaten 2011-2031 yang mana dokumen RTRW tersebut berpatokan pada RTRW Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai kawasan pertanian. Hal ini didukung oleh penetapan seluas 98.637 hektar lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Cianjur yang tediri dari kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan seluas 21.502 hektar tersebar di setiap kecamatan. Namun dalam hal ini Kabupaten Cianjur dalam RTRW tidak menjabarkan secara spesifik rincian setiap lahan sawah terutama untuk kawasan tanaman pangan disetiap kecamatannya. Berikut peta pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Cianjur.



PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Capittd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N C I A N J U R

Sumber Data :
1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan Arteri
- Rel K.A.
- Rencana Rel K.A.
- Sungai
- Waduk / Situ

KAWASAN BUDIDAYA
- HP Hutan Produksi
- HPT Hutan Produksi Terbatas
- Pertanian Tanaman Pangan
- Pertanian Tanaman Hortikultura
- Perkebunan/Tanaman Tahunan
- PPK Permukiman Perkotaan
- PPD Permukiman Perdesaan
- Perairan
- Potensi Pertambangan

Sumber: Bappeda Kabupaten Cianjur, 2017

Gambar 4.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cianjur

Selain menetapkan kawasan peranian, pemerintah kabupaten dalam RTRW-nya lebih spesifik membagi pengembangan kawasannya pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, sebagai berikut.

1. PKW promosi adalah PKW yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat. PKW promosi ini yaitu promosi Perkotaan Cianjur
2. PKL yang meliputi:

   a. PKL perkotaan Cianjur yang memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat

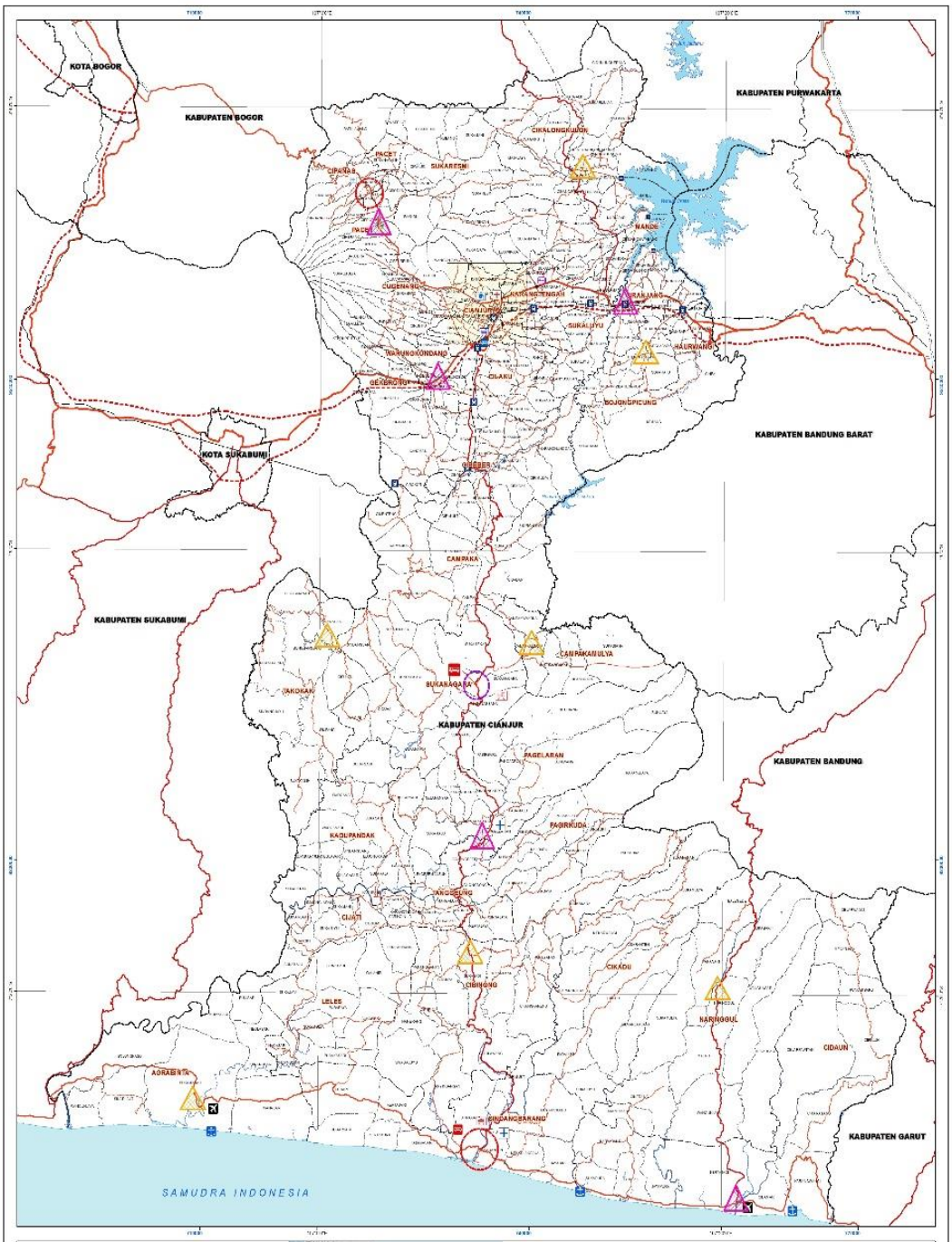
   b. PKL perkotaan Sindangbarang yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan

   c. PKL perdesaan Sukanagara yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah dan pertambangan
3. PKL promosi terdiri dari promosi perkotaan Cipanas yang memiliki fungsi utama sebagai pengolahan hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah.
4. PPK yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota, terdiri atas:

   a. Wilayah Utara: PPK Pacet, PPK Ciranjang, dan PPK Warungkondang;

   b. Wilayah Tengah: PPK Pagelaran;

   c. Wilayah Selatan: PPK Cidaun.



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N C I A N J U R

Sumber Data :
1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Sumber: Bappeda Kabupaten Cianjur, 2017

Gambar 4.9 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cianjur

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dibuktikan dengan adanya penurunan luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur. Sebagian besar dari alih fungsi lahan pertanian ini dijadikan sebagai permukiman dan industri. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan yang hingga sekarang belum mampu mengatasi hal ini. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Evaluasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk melihat bagaimana peraturan ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Cianjur khususnya ditingkat mikro seperti dikalangan petani. Hal ini penting dilakukan untuk melihat apakah tujuan ataupun sasaran yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut telah dilaksanakan atau belum.

Dalam UU No 41 Tahun 2009 disebutkan tentang pengembangan lahan pertanian yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan percetakan lahan pertanian pangan, penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan pengalihan fungsi lahan nonpertanian menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam RTRW Kabupaten Cianjur pembahasan mengenai LP2B ini hanya sebatas narasi dan belum diaplikasikan ke dalam data spasial. Dalam RTRW Cianjur disebutkan bahwa salah satu kawasan peruntukan pertanian adalah penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Penetapan LP2B ini sangat penting terutama untuk wilayah yang memang diperuntukan untuk kegiatan pertanian mengingat kebijakan mengenai pangan merupakan kebijakan jangka panjang dan harus diatur sedemikian baik. Berikut ini merupakan permasalahan pelaksanaan LP2B di Kabupaten Cianjur.

Tabel IV-11
Permasalahan Pelaksanaan LP2B di Kabupaten Cianjur

Lokasi	Permasalahan
Kabupaten Cianjur	LP2B baru akan disusun pada tahun 2017
	Percetakan sawah baru dimulai tahun 2017 melalui APBN sesuai dengan ketentuan LP2B
	RDTR Kabupaten Cianjur belum selesai sehingga rancangan perda untuk LP2B belum bisa dibahas
	Luasan lahan dan lokasi yang akan dijadikan sebagai LP2B belum tercantum dalam RTRW

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, 2017

Selain permasalahan tersebut terdapat beberapa kendala implementasi kebijakan LP2B secara umum. Berikut ini merupakan kendala dalam implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009.

Tabel IV-12
Kendala Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B

Kendala	Penjelasan
Data spasial lahan sawah belum tersedia dengan baik, sementara lahan yang akan dijadikan LP2B adalah lahan irigasi	Ketersediaan data spasial yang baik dan benar tentang data spasial lahan sawah sangat berguna dalam penyusunan RTRW yang baik
Pembiayaan atau dana insentif yang sangat besar untuk pengendalian alih fungsi lahan dan fasilitasi kawasan LP2B	• kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun • Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya membutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah (Kementerian Pertanian)

Implementasi kebijakan LP2B hingga saat ini belum ditetapkan di Kabupaten Cianjur. Hal ini karena Kabupaten Cianjur sendiri baru akan memulai penyusunan kebijakan LP2B pada tahun 2017 sehingga LP2B hanya sebatas narasi pada RTRW

Kabupaten Cianjur. Tabel IV-13 memperlihatkan kesesuaian kebijakan LP2B dalam RTRW Cianjur sebagai berikut.

Tabel IV-13
Kesesuaian LP2B di Dalam RTRW

Lokasi	Perda RTRW	Pasal dan Ayat Kawasan Pertanian dan LP2B	Luasan dan Penetapannya	Sumber dan Tahun
Kabupaten Cianjur	Perda RTRW No 17 Tahun 2012	Pasal 36 ayat 3: akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan

Berdasarkan tabel IV-13 dapat dilihat bahwa kebijakan LP2B di Kabupaten Cianjur akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan. Selain meninjau kesiapan implementasi kebijakan tersebut ditingkat kabupaten, maka ditinjau pula ditingkat mikro pada studi kasus petani Desa Cikancana. Tabel IV-14 menjelaskan tentang penerapan kebijakan LP2B ditingkat petani berdasarkan aspek pengendalian.

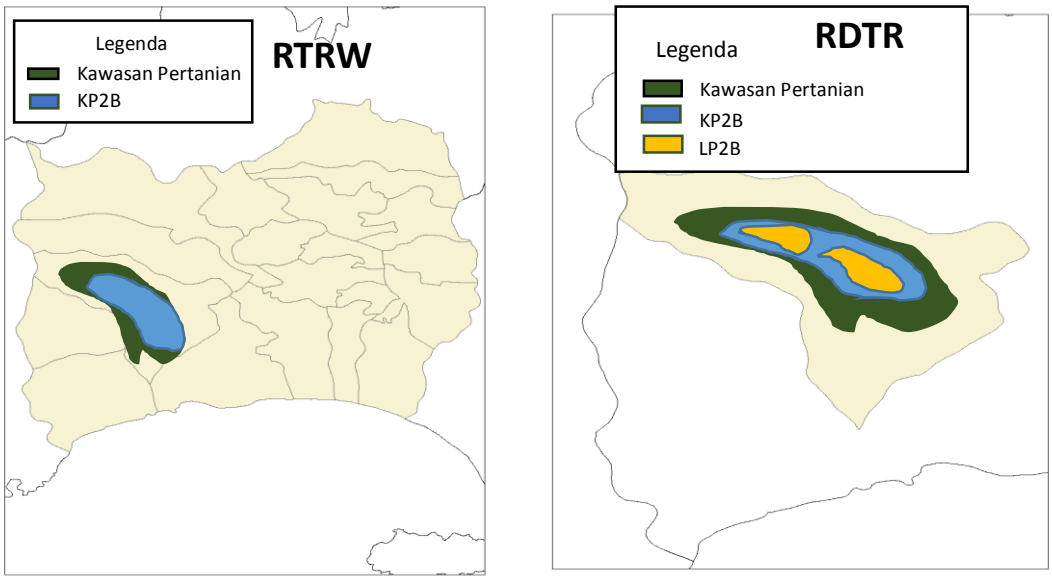
Tabel IV-14
Evaluasi LP2B Ditingkat Mikro (Petani) Di Desa Cikancana

Aspek LP2B	Pasal dan Ayat	Kebijakan LP2B	Kondisi Eksisting	Hasil Evaluasi
Pengendalian	Pasal 44 ayat 1-4	Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk	• 3 dari 30 petani berkeinginan untuk menjual lahan • 2 dari 30 petani pernah ditawari untuk menjual lahan sawah	Peraturan ini sudah mulai diterapkan di Desa Cikancana

		infrastruktur ketika terjadi bencana	(tidak terjadi alih fungsi lahan)	
Pengendalian	Pasal 38	Insentif perlindungan LP2B kepada petani	1 kelompok petani mendapatkan bantuan berupa alat pertanian yaitu traktor senilai 12 juta rupiah	Peraturan sudah mulai diterapkan di Desa Cikancana

Peraturan mengenai LP2B belum berjalan di Kabupaten Cianjur, namun larangan mengenai alih fungsi lahan sudah diterapkan di desa khususnya Desa Cikancana yang menjadi lokasi penelitian. Pemerintah desa telah melarang kegiatan alih fungsi lahan sawah ke non-sawah karena sebelumnya lahan sawah yang ada di Desa Cikancana berubah fungsi menjadi permukiman. Selain pelarangan konversi lahan sawah, petani juga mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten.

Berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 penetapan LP2B haruslah pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang untuk tingkat kabupaten/kota. Berikut aplikasi LP2B dalam RTRW dan RDTR pada gambar 4.10.



Sumber: Bappenas, 2016

Gambar 4.10 Contoh Peta Aplikasi LP2B pada RTRW dan RDTR

Berikut merupakan keterkaitan antara LP2B dan alih fungsi lahan pertanian di Cianjur.

Tabel IV-15
Keterkaitan LP2B dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cianjur

Isu	Penjelasan	Hasil Temuan
Kerawanan pangan	LP2B dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kawasan pertanian pangan secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan	Hasil prediksi kebutuhan pangan (beras) dan produksi beras di Kabupaten Cianjur selama 20 tahun kedepan mengalami surplus karena luas lahan sawah dan produktivitas yang bertambah
Ketersediaan lahan	Perencanaan LP2B didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan nasional, kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan musyawarah petani	Berdasarkan perkiraan produksi beras 20 tahun kedepan dengan produktifitas sawah meningkat, maka ditemukan luas lahan yang terus bertambah.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Penetapan KP2B hingga saat ini belum dilakukan mengingat kebijakan LP2B akan diatur lebih lanjut pada peraturan bupati.	Belum terdeliniasi
Zoning regulation	Penetapan KP2B merupakan dasar dari peraturan zonasi. *Zoning regulation* terkait KP2B yang tertera di RTR Kabupaten belum terlalu jelas sehingga sulit untuk menentukan lahan yang boleh dialihfungsikan dan tidak.	Belum ada *zoning regulation*
SLP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.	LP2B dibentuk untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk ditengah terjadinya alih fungsi lahan. Sesuai dengan tujuannya LP2B untuk melindungi kawasan pertanian secara berkelanjutan agar meminimalisir kerawanan pangan akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor-sektor non pertanian.	Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah studi sebagian besar petani enggan untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan sawahnya.

Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan dan ketahanan pangan merupakan satu kesatuan dan sangat berkaitan erat. LP2B dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat walaupun pada kenyataannya saat ini benturan akan kebutuhan lahan sangat sering terjadi. Dengan adanya kasus kerawanan pangan ini maka disinilah peran kebijakan LP2B untuk meminimalisir hal ini terjadi. LP2B harus mampu menjadi solusi untuk *zoning regulation* yang lebih jelas dalam RTRW, mampu meningkatkan produktifitas pertanian, dan menjadi solusi memenuhi kebutuhan pangan selain diversifikasi pangan.

Melalui implementasi LP2B maka sudah jelas bahwa pentingnya proteksi terhadap lahan pertanian itu sendiri. Kebijakan atau regulasi pemerintah merupakan kunci utama dalam mencapai ketahanan pangan. Sebuah kebijakan keamanan pangan yang efektif bertindak untuk mengontrol langkah-langkah yang mempengaruhi ketahanan pangan jangka panjang dan juga bekerja untuk mengurangi efek destabilisasi pangan jangka pendek.